Solo Masuk 10 Besar Smart City

SOLO (KR) - Kota Solo masuk dalam deretan 10 besar smart city di Indonesia yang penerapannya menuju nature. Ini ditandaskan Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, Safrizal ZA dalam press conference usai opening ceremony Indo Smart City 2022 di Solo Techno Park, Rabu (12/10).

"Belum ada kota yang penerapan smart city-nya mature. Kita semua masih in struggle. Masih berjuang. Tapi Kota Solo ini kalau dalam 10 besar smart city, sudah masuk," tuturnya. Ibarat taman bunga yang bermekaran, smart city di Indonesia juga tengah bermunculan. Maka Kementerian Dalam Negeri terus berkolaborasi dengan berbagai kota untuk memajukan penerapan smart city.

Disebutkan, saat ini smart city yang sedang berkembang ada berbagai tahap. Ada yang baru inisiasi, berkembang, sampai tahap mature. "Harapannya, makin banyak yang mature, yang sempurna. Tahun depan, kami akan mulai mengukur maturasi penerapan smart city di Indonesia melalui Peraturan Pemerintah tentang Perkotaan."

Sementara Ketua Dewan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI), Bima Arya Sugiarto menjelaskan sudah sekitar 10 tahun smart city di kota-kota Indonesia. Namun belum semua penerapannya bisa memberikan layanan minimum basic service yang dibutuhkan masyarakat. "Padahal smart city bisa membantu untuk menjemput peluang. Ada peluang meningkatkan komponen produksi dalam negeri dan menggairahkan UMKM. Solo ini luar biasa kalau bicara UMKM dan kolaborasi dengan stakeholder pentahelix," jelasnya.

Saat ini, lanjut Walikota Bogor, sudah bukan eranya command center. Namun sudah memasuki collaboration center. Di Kota Bengawan, dengan adanya Solo Techno Park, adalah contoh collaboration center yang mendukung penerapan smart city. Walikota Solo, Gibran Rakabuming Raka menambahkan eksistensi Solo Techno Park memang menjadi ruang kolaborasi yang sangat besar. Intinya, pemerintah membuka peluang untuk bekerjasama dengan pihak swasta. **(Qom)**

KR-Qomarul Hadi

Dirjen Safrizal dan walikota Gibran bersama tekan tombol.

Bawaslu Ajak Masyarakat Awasi Tahapan Pemilu

KARANGANYAR (KR) - Masyarakat dari berbagai lapisan diajak berkolaborasi dengan Bawaslu dalam mengawasi pemilu sejak tahapan dimulai. Partisipasi masyarakat menentukan kualitas hasil pesta demokrasi lima tahunan itu. Demikian disampaikan Ketua Bawaslu Karanganyar, Nuning Ritwanita Priliastuti kepada wartawan di sela Sosialisasi Pengawasan Partisipatif bertema Memasyarakatkan Kepedulian dan Pengawasan Partisipatif Pemilu Serentak 2024, Selasa (11/10). Nuning mengundang Ormas perempuan, kelompok pemuda, hingga sasaran lain. Ia menyebut perlunya kelompok masyarakat tersebut memahami tentang kepemiluan.

"Sosialisasi pengawasan partisipatif bukan hanya tanggung jawab Bawaslu. Tapi seluruh masyarakat. Kepedulian mereka harus ditumbuhkan. Salah satunya memberi pendidikan dan wawasan partisipatif," katanya. Ia mengatakan tahapan pemilu 2024 sudah dimulai 20 Juni 2022. Masyarakat dapat berpartisipasi menyukseskan pemilu dengan responsif terhadap aktivitas politik. Jika mendapati pelanggaran, dipersilakan menghubungi Bawaslu atau panwascam. Masyarakat tak disarankan main hakim sendiri. Lebih lanjut dikatakan, Bawaslu telah memetakan desa rawan politik uang berdasarkan pengawasan pemilu pada 2019. Dari situlah Bawaslu membentuk 22 desa partisipatif. Sementara itu dalam sosialisasi itu dihadirkan narasumber yakni akademisi UNSA Dr Diah Nur Widayanti dan Divisi Pencegahan Bawaslu Sri Handoko. **(Lim)**

TMMD Sengkuyung III Lakukan Betonisasi Jalan

SALATIGA (KR) - Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Sengkuyung Tahap III Tahun 2022 di Salatiga dibiayai sebesar Rp 271.449.000. TMMD ini dilaksanakan di wilayah Kelurahan Kauman Kidul, Kecamatan Sidorejo dan dimulai 11 Oktober sampai 9 November 2022. Sasaran kegiatan ini, adalah pembangunan betonisasi jalan dengan panjang 300 meter, lebar 2,5 meter dan tebal 15 cm.

Sementara sasaran non fisik berupa penyuluhan wawasan nusantara (wasnus), narkoba dan kamtibmas, kesehatan stunting, pemberdayaan perempuan dan anak. Sumber dana TMMD Sengkuyung III ini bersumber dari APBD Provinsi Jateng sebesar Rp 194.000.000 dan APBD Kota Salatiga sebesar Rp 77.449.000 sehingga jumlahnya Rp 271.449.000. Pembukaan TMMD dilakukan Penjabat (Pj) Walikota Salatiga, Sinoeng N Rachmadi, di Lapangan Jayengrono Kauman Kidul, Sidorejo Salatiga, Selasa (11/10).

Sinoeng berharap TMMD Tahap III ini diharapkan bisa menjadi sebuah totalitas dalam mengerjakan pembangunan fisik maupun non fisik dan membangun konsolidasi yang erat antara TNI dan masyarakat. "TMMD sangat bermanfaat untuk masyarakat dan bisa langsung dirasakan oleh mereka. Kebersamaan dan kemanunggalan itu hadir bersama TNI, Polri, Satpol PP, ASN, pelajar, mahasiswa dan tokoh masyarakat," kata Sinoeng. Dirinya juga memberikan dukungan agar semua mau memberikan peran yang kontributif untuk membangun desa. TMMD Sengkuyung bukan hanya untuk republik namun juga untuk nyengkuyung cipta, rasa dan karsa dalam mencintai sesama dan peduli kepada sesama.

Apresiasi juga diberikan kepada Kodim 0714 Salatiga beserta jajarannya yang melaksanakan kegiatan TMMD Tahap III di wilayah Kauman Kidul, Salatiga ini. Dalam sisi politik, Pj Walikota Salatiga menyinggung tahun depan (2023) sudah mulai tahun politik, jadi kegiatan non fisik juga harus ditekankan dan korelatif dengan nilai-nilai kebangsaaan. "Kita harus bisa menjaga kondusifitas dan partisipasi politik masyarakat," katanya. **(Sus)**

Satlantas Polres Boyolali Sosialisasikan Tiblantas

BOYOLALI (KR) - Guna menekan angka pelanggaran berlalulintas serta kecelakaan di jalan umum, sejumlah petugas dari Satlantas Polres Boyolali melakukan sosialisasi terhadap pengemudi angkutan umum dan tukang ojek pangkalan di pasar tradisional Sunggingan Boyolali.

Kanit Keamanan Keselamatan Berlalulintas (Kamsel) Satlantas Polres Boyolali, Ipda Budi Purnomo mengatakan, pada bulan ini 3 sampai 10 Oktober 2022 Polres Boyolali melakukan Operasi Zebra Candi 2022. Dalam operasi tersebut bertujuan untuk menekan angka pelanggaran, menciptakan Kamsel serta untuk menurunkan angka lakalantas. Salah satu fokusnya, penekanan pentingnya masyarakat menaati masalah ketertiban lalu lintas (tiblantas).

"Dari unit Kamsel melakukan penyuluhan terhadap pengemudi angkutan umum, pengemudi pribadi dan tukang ojek pangkalan di pasar tradisional Sunggingan Boyolali," katanya kepada wartawan, Rabu (12/10). Dalam penyuluhan ini, disampaikan kepada pengemudi ojek online dan ojek pangkalan terkait pemakaian helm di saat membawa penumpangnya. "Penyuluhan seperti ini sering kami lakukan, hasilnya alhamduliah para tukang ojek pangkalan tidak mengabaikan lagi pemakaian helm terhadap penumpangnya," ujarnya.

Pihaknya mengimbau kepada lapisan masyarakat untuk mentaati peraturan lalu lintas dan menaati rambu rambu di jalan umum. "Taati rambu di jalan umum, jaga jarak dalam berkendara di jalan umum, sehingga dalam berkendara itu terasa nyaman dan aman," tandasnya.

Sementara itu, Kanit Gakkum Satlantas Polres Boyolali Ipda Bambang Nova mengatakan, selama operasi zebra candi 3 sampai 10 Oktober 2022 ini jumlah pelanggaran sebanyak 2191. Pelanggaran tersebut didominasi tidak menggunakan helm dan 25 persennya didominasi dengan kecepatan.

"Di Boyolali itu ada etle mobil dan etle statis. Jumlah kecelakaannya alhamdulilah menurun. Selama operasi zebra ini ada 17 kejadian, totalitas kecelakaan hanya satu meninggal dunia," katanya. Sebelum diadakan upaya penyuluhan terhadap pengguna kendaraan angka kecelakaan cukup tinggi, namun, setelah ada sosialisasi tersebut diketahui mengalami penurunan. "Alhamdulilah, setelah diadakan sosialisasi berulang kali terhadap pengemudi umum, sopir angkutan umum, serta tukang ojek angka pelanggaran serta kecelakaan menurun," pungkasnya. **(R-3)**

KR-Mulyawan

Anggota Satlantas Polres Boyolali melakukan sosialisasi riblantas kepada pengemudi ojek di Pasar Sunggingan.

Pemilik Tanah di Wadas Setujui Nilai UGR

PURWOREJO (KR) - Sebanyak 148 warga pemilik 213 bidang tanah terdampak Bendungan Bener di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, setuju dengan besaran nilai uang ganti rugi (UGR).

Mereka sepakat dengan hasil penilaian yang disampaikan tim pengadaan tanah dalam musyawarah di Kantor Desa Wadas, Selasa (11/10) siang.

Setelah menyetujui nilai UGR dan menandatangani berita acara hasil musyawarah, pemilik lahan tinggal menunggu dilakukannya pembayaran.

"Selanjutnya, setelah ada kata mufakat, adalah menuju proses pencairan dan semoga bisa cair akhir Oktober 2022," ungkap Ketua Panitia Pengadaan Tanah Bendungan Bener yang juga Kepala BPN Purworejo Andri Kristanto, menjawab pertanyaan KR, usai musyawarah.

Musyawarah penyampaian bentuk ganti kerugian dan besaran nilai ganti rugi dilaksanakan dalam dua tahap. Tahap pertama pada Selasa pagi diikuti 72 warga pemilik 98 bidang tanah. Tidak ada kendala dalam musyawarah itu dan semua peserta menyetujui hasil penilaian tim apraisal.

Hal yang sama juga terjadi pada musyarawah tahap dua yang diikuti 76 warga dan pihak desa. Mereka memiliki 112 bidang tanah dan terdapat 3 bidang tanah kas desa.

"Prosesnya juga lancar, tidak ada penolakan, semua setuju dengan hasil penilaian tim," ujarnya.

Menurutnya, masih ada 65 bidang tanah yang belum dimusyawarahkan dengan pemiliknya. "Ada 65 bidang susulan yang baru selesai dinilai, tinggal menunggu jadwal untuk musyawarah," ucapnya.

Berdasarkan data tim pengadaan tanah, sebanyak 296 bidang di Desa Wadas sudah menerima UGR, 213 bidang setuju hasil penilaian, 65 bidang sudah dinilai dan menunggu jadwal musyawarah, 5 bidang masih berproses, dan 3 menunggu pembayaran.

"Kalau gunakan patokan data awal 617 bidang, maka tersisa 35 bidang tanah saja yang belum boleh diukur oleh pemiliknya," terangnya. Tanah yang sebagian besar terletak di bukit Desa Wadas, rencananya akan dibangun menjadi kuari atau tambang batu andesit. Batu andesit itu akan digunakan untuk material urukan Bendungan Bener di Desa Guntur, Kecamatan Bener.

Pemilik lahan warga Dusun Krajan Wadas, Zuhri (58) mengaku lega dengan hasil musyarawah penyampaian nilai ganti rugi itu. Zuhri memiliki 6 bidang tanah yang terkena proyek kuari dengan nilai ganti rugi kurang lebih Rp 9 miliar.

"Rasanya senang dan lega sudah mufakat, tinggal menunggu pencairan. Nilainya berkali-kali lipat dari harga normalnya," ujarnya. Setelah cair, katanya, uang itu akan digunakan untuk membeli tanah lagi di desa lain sebagai pengganti lahan yang hilang di Desa Wadas. **(Jas)**

Polisi dan Pramuka Berprestasi Terima Penghargaan

SUKOHARJO (KR) - Kapolres Sukoharjo AKBP Wahyu Nugroho Setyawan serahkan sejumlah penghargaan kepada personel Polres Sukoharjo, Pramuka dan atlet berprestasi. Penghargaan diberikan sebagai bentuk apresiasi atas kinerja yang diraih. Selain itu juga untuk memotivasi lainnya untuk bisa meraih prestasi serupa.

Kapolres mengatakan, penghargaan diberikan atas keikutsertaan 12 saka bhayangkara sebagai perwakilan Polres Sukoharjo dalam ajang perkemahan Saka Bhayangkara Kwartir Daerah Jateng tahun 2022.

Dalam sambutannya Kapolres berpesan kepada 12 saka bhayangkara untuk terus meningkatkan kemampuan dan raih prestasi.

"Terus tingkatkan kemampuan kalian, jangan mudah puas atas capaian-capaian yang kalian raih. Asah terus kemampuan kalian dan raih prestasi sebanyak banyaknya," ujarnya.

Selain memberikan penghargaan kepada saka bhayangkara, Kapolres Sukoharjo juga memberikan penghargaan kepada personil yang berprestasi.

Ada 4 personil bagian logistik yang mendapatkan penghargaan, mereka dinilai telah berjasa dalam renovasi masjid di Dukuh Kerjo Kecamatan Bulu.

Empat personel yang mendapatkan penghargaan antara lain AKP S Winardi, Aiptu Rahmat Basuki, Aipda Yanto dan Aipda Eko Saputro.

"Saya selaku Kapolres mengucapkan banyak banyak terima kasih dan memberikan apresiasi setinggi-tingginya, atas dedikasi kalian yang telah membantu proses renovasi masjid," lanjutnya.

Disamping memberikan penghargaan, Kapolres juga memberikan thropy kepada 3 pasangan pemenang lomba bulu tangkis Presisi Cup Polres Sukoharjo yang diselenggarakan beberapa waktu yang lalu dalam menyemarakkan peringatan hari kemerdekaan RI. **(Mam)**

KR-Dok Polres Sukoharjo

Kapolres Sukoharjo AKBP Wahyu Nugroho Setyawan saat menyerahkan penghargaan.

Fapsedu Salatiga Mulai Beraktivitas

SALATIGA (KR) - Forum Antar Umat Beragama Peduli Keluarga Sejahtera dan Kependudukan (Fapsedu) Salatiga mulai bergerak setelah selama hampir dua tahun ëvakumí karena situasi pandemi Covid-19. Sekretaris Daerah Salatiga Wuri Pujiastuti memberikan apresiasi kinerja Forum Antar Umat Beragama Peduli Keluarga Sejahtera dan Kependudukan (Fapsedu) Kota Salatiga yang mengkampanyekan program keluarga berencana (KB).

Menurut Sekda, kesuksesan program KB karena juga peran dari tokoh masyarakat dan tokoh agama. Pemkot Salatiga akan mendukung sepenuhnya. Terkait anggaran, Sekda siap membantu apa yang bisa alokasikan dalam program Fapsedu. Para pengurus sudah meluangkan tenaga dan pikiran, dan pemerintah kota siap membantu. Kami berharap program ini bisa menjadi program adalah di DP3APPKB," tandas Sekda, Wuri Pujiasatuti saat menerima audiensi pengurus FAPSEDU Salatiga, Selasa (11/10).

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Salatiga mengatakan tujuan dibentuknya Fapsedu adalah sebagai wadah lintas agama berperan dalam program bangga kencana. Tahun 2022 berkoordinasi dengan DP3APPKB mengadakan kegiatan di masa orientasi sekolah berupa pembinaan genre. Ketua Fapsedu Salatiga, Rahmat Hariyadi mengatakan forum ini semacam organisasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).

"Hanya, untuk FKUB lebih menitikberatkan pada kerukunan umat beragama kalau FAPSEDU konsentrasi pada kesejahteraan keluarga dan kependudukan. Fapsedu Salatiga diberi SK Walikota kemudian diperbaharui 2021 karena diterpa pandemi Covid-19 dan mulai berkegiatan di 2022 ini," kata Rahmat Hariyadi. Pengurus FAPSEDU terdiri dari penasehat Ketua DPRD, Kapolres, dan Dandim dengan pengurus adalah perwakilan dari semua agama. Salah satu tokoh agama, Pdt Purwanto mengungkapkan agenda yang akan digelar diantaranya deklarasikan gereja ramah anak. **(Sus)**

Mimbar Legislatif

Komisi B Dorong Pengembangan Destinasi Wisata Segorogunung

KOMISI B DPRD Jateng mendorong BUMDes yang mengelola desa wisata Segorogunung untuk mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alamnya guna menjadi destinasi wisata andalan di Karanganyar. Peran BUMDes sebagai pengelola tempat itu dituntut bisa lebih professional.

KR-Budiono

Sumanto

Demikian dikatakan Ketua Komisi B DPRD Jateng Sumanto saat meninjau Desa wisata Segorogunung, Karanganyar belum lama ini. Desa Segorogunung yang berada di Kecamatan Ngargoyoso, saat ini sedang berupaya membangun desanya menjadi objek wisata. Berada di dataran tinggi, sejumlah spot dijual seperti tempat olahraga paralayang dan wisata alam. Bahkan sejumlah homestay pun sudah disiapkan bagi wisatawan yang ingin bermalam di Segorogunung.

Komisi B menilai desa Segoro Gunung memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai obyek wisata dengan daya tarik tersendiri. Hanya saja untuk menambah daya tariknya, pengelola harus berupaya untuk menambah fasilitas umumnya, seperti akses jalan menuju lokasi. Selain itu, Komisi B juga mendorong pemerintah desa untuk menambah fasilitas seperti toilet yang representatif, sehingga dapat menambah kenyamanan wisatawan saat berkunjung untuk menikmati keindahan alam di Desa Wisata Segorogunung itu.

Komisi B DPRD Jateng mendorong kepada Pemerintahan Desa (Pemdes) untuk menambah fasilitas-fasilitas umum yang nyaman untuk dipakai oleh masyarakat, khususnya para wisatawan. Dengan semakin banyak wisatawan yang berkunjung ke Segorogunung, bisa untuk menunjang kemajuan dan meningkatkan investasi serta meningkatkan kesejahteraan ekonomi penduduk sekitar.

Kepala Desa Segorogunung Tri Harjono mengatakan, saat ini pengembangan sektor pariwisata sudah mulai bergulir, salah satu wilayah yang menjadi andalan selain wisata olahraga Paralayang yaitu taman wisata perkebunan teh, wahana permainan atau bumi perkemahan Segoro Gunung Park yang dikelola oleh kelompok sadar wisata (pokdarwis).

Memasuki Desa Segorogunung pada sisi kanan dan kiri jalan disuguhi pemandangan hijau denga hamparan perkebunan teh seluas 100 hektare. Mengenai akses jalan, masih dalam tahap pembangunan. Diharapkan tahun depan pembangunan akses jalan menuju Segorogunung sudah rampung. **(*)**

(Disampaikan oleh Ketua Komisi B DPRD Jateng Sumanto kepada wartawan KR Biro Semarang, Budiono Isman-Anf)